

Pemberdayaan Masyarakat UMKM Melalui Pembangunan Studi Kasus: Di Desa Cibatuk Kecamatan Cibatuk Kabupaten Garut

**Muhammad Rafli Permanayudha^{1*}, Naila Aulia Rahmah Virhanida², Nabila Ilmi
Gumilar³, Putri Aulia Tauziah⁴, Muhammad Asro⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

*e-mail koresponding: 1*yudhapermanapermanayudha@gmail.com

Abstrak

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah pedesaan menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UMKM dalam proses pemberdayaan masyarakat serta mengidentifikasi potensi sumber daya lokal yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing usaha di Desa Cibatuk, Kabupaten Garut. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Desa Cibatuk berkembang dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan warisan budaya sebagai basis produk unggulan, seperti kerajinan tradisional dan olahan pangan lokal. Keberadaan UMKM terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja, serta penguatan kapasitas sosial ekonomi warga desa. Namun demikian, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi digital, dan minimnya jaringan pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kolaboratif dari pemerintah desa, lembaga pendidikan, serta sektor swasta dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, pendampingan manajemen usaha, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan UMKM berbasis potensi lokal dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan, asalkan diiringi dengan strategi pemberdayaan yang terencana dan partisipatif.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan UMKM

Abstract

The development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in rural areas plays a strategic role in promoting local economic growth and strengthening community empowerment. This study aims to examine the contribution of MSMEs to community empowerment and to identify local potentials that can be optimized to enhance business sustainability in Cibatuk Village, Garut Regency. The research adopts a qualitative descriptive approach, with data collected through field observations, in-depth interviews, and documentation. The findings indicate that MSMEs in Cibatuk Village have grown by utilizing local natural resources and cultural heritage as the foundation for developing distinctive products, including traditional handicrafts and local food processing. The presence of MSMEs has contributed to increased household income, job creation, and the strengthening of local socio-economic capacity. However, several challenges remain, such as limited access to capital, low levels of digital literacy, and weak marketing networks. These constraints hinder MSMEs from expanding their market reach and improving competitiveness. Therefore, collaborative support from village governments, educational institutions, and the private sector is essential, particularly in the form of entrepreneurship training, business management assistance, and the adoption of digital technologies for marketing and distribution. The study concludes that strengthening MSMEs based on local potential can serve as a key driver of sustainable rural economic development, provided it is supported by structured, participatory, and continuous empowerment strategies.

Keywords: Community Empowerment, MSME Development

1. PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pembangunan nasional dari pendekatan sentralistik menuju demokratisasi dan desentralisasi telah membawa implikasi signifikan terhadap cara pandang negara dalam merancang dan melaksanakan pembangunan. Paradigma baru ini menekankan

pentingnya peran serta masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan yang pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas, potensi, serta hak untuk menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Pergeseran paradigma ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri (Sumodiningrat, 1999).

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian integral dari paradigma pembangunan yang berorientasi pada manusia. Konsep pemberdayaan memfokuskan perhatian pada penguatan kemampuan individu dan kelompok agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan tidak hanya mencakup aspek intelektual atau peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga meliputi aspek material, fisik, dan manajerial. Aspek-aspek tersebut selanjutnya berkembang ke dalam dimensi sosial budaya, ekonomi, politik, keamanan, serta lingkungan hidup yang saling berkaitan satu sama lain (Jamaludin, 2017). Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipahami sebagai proses yang parsial, melainkan sebagai upaya menyeluruh untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dinamika pembangunan.

Dalam konteks pembangunan nasional, pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab utama agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati secara fisik, seperti infrastruktur atau peningkatan produksi, tetapi juga mampu menciptakan masyarakat yang berdaya. Masyarakat yang berdaya ditandai dengan adanya kemampuan untuk mengambil keputusan, mengelola sumber daya, membangun kelembagaan lokal, serta menjalin kerja sama yang produktif. Kekuatan tersebut tercermin dalam aspek ekonomi, kelembagaan, sosial, intelektual, serta komitmen kolektif untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (Sumodiningrat, 1999).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat turut memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Di satu sisi, kemajuan ini membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan yang semakin kompleks. Permasalahan pembangunan tidak lagi bersifat sederhana, melainkan multidimensional dan memerlukan pendekatan yang adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi konsep pembangunan telah membawa perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat, sekaligus menuntut adanya strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan.

Pembangunan dan negara merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Suatu negara secara berkelanjutan melakukan pembangunan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Pada beberapa komunitas, pembangunan telah berhasil membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, namun pada komunitas lainnya masih menghadapi ketimpangan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, pembangunan perlu diarahkan pada sektor-sektor strategis yang mampu menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama di tingkat lokal dan pedesaan.

Salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena memiliki kontribusi yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga berperan penting dalam mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat struktur ekonomi nasional. Sejalan dengan semangat Nawacita, pemerintah berupaya mendorong peningkatan

produktivitas rakyat dan memperkuat kemandirian ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi domestik, termasuk UMKM.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki aset maksimal Rp50 juta di luar tanah dan bangunan serta omzet tahunan maksimal Rp300 juta. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan aset antara Rp50 juta hingga Rp500 juta dan omzet Rp300 juta hingga Rp500 juta per tahun. Sementara itu, usaha menengah adalah usaha produktif yang memiliki aset Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan omzet tahunan antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa UMKM mencakup spektrum usaha yang luas dan memiliki karakteristik yang beragam.

Usaha mikro secara khusus memiliki peran penting dalam perekonomian lokal. Karakteristik usaha mikro ditandai oleh keterbatasan modal, jumlah tenaga kerja yang relatif sedikit, serta peran ganda pemilik usaha sebagai produsen, pemasar, dan manajer. Meskipun demikian, usaha mikro memiliki fleksibilitas yang tinggi dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat komunitas. Keberadaan usaha mikro tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Dalam perencanaan dan pengembangan UMKM, studi kelayakan usaha menjadi aspek penting untuk menilai potensi keberhasilan suatu usaha. Namun, pada praktiknya, banyak pelaku UMKM lebih berfokus pada keberlangsungan pendapatan tanpa didukung analisis kelayakan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan sosial yang berkelanjutan. Pendampingan sosial berfungsi untuk membantu pelaku UMKM dalam mengatasi keterbatasan pengetahuan, manajemen usaha, serta akses terhadap permodalan dan pasar.

Kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi lokal dan nasional telah menjadi perhatian utama dalam berbagai kajian ekonomi. Wijaya (2022) menyatakan bahwa UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan UMKM di tingkat desa dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Sinergi antara pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, dan pembangunan desa menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Suharto (2022) menegaskan bahwa sinergi tersebut memungkinkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM berjalan selaras dengan tujuan pembangunan desa secara menyeluruh.

2. METODE PENELITIAN/PELAKSANAAN

Artikel ini membahas tentang Peran Pemerintah desa Cibatuh Melalui Pembangunan Pada Pemberdayaan Masyarakat. Jenis metode penelitian ini merupakan kajian pustaka (literatur reseach). Artikel ini akan membahas jurnal ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan yang telah dipilih. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian ini, yakni: a) memilih artikel, b) mengumpulkan jurnal relevan, c) mengkaji teori-teori, d) mengumpulkan teori-teori pendukung, e) menarik kesimpulan dari pembahasan serta rekomendasi online.

3. HASIL KEGIATAN/PEMBAHASAN

1) Peran pemerintah dalam pembangunan desa untuk pemberdayaan Masyarakat

Peran pemerintah dalam pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat sangat krusial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, menggalang sumber daya, dan memberikan arah bagi upaya pemberdayaan Masyarakat. Peran pemerintah dalam konteks ini, Pemerintah memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan yang menyeluruh dan

berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup aspek-aspek seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi, yang semuanya merupakan fondasi pemberdayaan masyarakat.

Dan Pemerintah bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk mendukung program pemberdayaan. Ini mencakup investasi dalam infrastruktur, pelatihan keterampilan, pelayanan kesehatan, dan inisiatif lain yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan pendidikan, pemerintah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pendidikan yang berkualitas dan relevan dapat membuka pintu kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam sektor ekonomi dan sosial. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dan memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Kesehatan yang baik menjadi dasar bagi produktivitas dan kualitas hidup yang lebih baik.

2) Peran Pemerintah desa Cibatu Terhadap Pemberdayaan masyarakat melalui UMKM

Dalam hal ini pemerintah desa Cibatu memiliki peran sentral dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan pemahaman mendalam tentang potensi lokal dan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Desa Cibatu mengambil beragam inisiatif untuk menguatkan sektor UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, diantaranya:

1. Mendukung Pembentukan dan Pengembangan UMKM

Pemerintah Desa Cibatu berperan sebagai fasilitator utama dalam mendukung pendirian dan pengembangan UMKM di wilayahnya. Mereka memberikan bimbingan kepada calon pengusaha, membantu dalam proses perizinan, dan menyediakan akses informasi terkait regulasi usaha.

2. Fasilitator Pelatihan dan Pendidikan Kewirausahaan

Untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku UMKM, Pemerintah Desa Cibatu menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan kewirausahaan secara reguler. Ini mencakup aspek manajemen usaha, pemasaran, keuangan, dan teknologi guna memperkuat daya saing UMKM lokal. Salah satu contoh nya Adalah pelatihan khusus yang di selenggarakan oleh Pemerintah desa Cibatu untuk mengadakan pelatihan marketing untuk penjualan bako bagi pengrajin tembakau yang berkolaborasi dengan dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten garut

3. Pemfasilitas Akses Terhadap Sumber Daya

Pemerintah Desa Cibatu berinisiatif untuk memudahkan akses UMKM terhadap sumber daya, termasuk pendanaan dan pengadaan bahan baku, dan peralatan produksi. Mereka menjembatani hubungan dengan lembaga keuangan lokal, mitra bisnis, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan ketersediaan sumber daya tersebut.

4. Penyedia Infrastruktur Pendukung UMKM

Infrastruktur yang memadai menjadi faktor kunci dalam kesuksesan UMKM. Pemerintah Desa Cibatu mengambil tanggung jawab dalam pengembangan infrastruktur pendukung seperti pasar lokal, jaringan distribusi, dan akses transportasi yang memudahkan distribusi produk UMKM.

5. Pembinaan dan Pendampingan UMKM

Pemerintah Desa Cibatu membentuk tim khusus untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM yang ada. Ini melibatkan pertemuan rutin,

konsultasi, dan evaluasi performa usaha untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan UMKM.

6. Pengembangan Sentra UMKM

Dalam upaya untuk menciptakan sinergi di antara UMKM, Pemerintah Desa Cibatu membangun sentra UMKM. Sentra ini menciptakan ruang untuk kolaborasi, pertukaran ide, dan pemasaran bersama, yang meningkatkan daya saing kolektif UMKM di tingkat desa.

7. Penguatan Identitas dan Pemasaran Produk Lokal

Pemerintah Desa Cibatu mendukung upaya pemasaran produk lokal dengan menguatkan identitas merek dan promosi produk-produk unggulan. Ini termasuk mendukung kegiatan pameran, festival, dan inisiatif pemasaran lainnya untuk meningkatkan daya tarik produk UMKM.

3) Peran Masyarakat desa Cibatu dalam pemberdayaan masyarakat

Desa Cibatu bukan sekadar nama geografis, melainkan kisah hidup yang terwujud dalam semangat gotong-royong dan kebersamaan sesuai dengan nama yang di beri oleh para tokoh masyarakat Cibatu bahwa Cibatu memiliki arti yang sarat makna dan erat kaitanya dengan kondisi geografis serta budaya Masyarakat setempat. Sehingga peran masyarakat di Desa Cibatu menjadi elemen kunci dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang berkembang di desa ini.

Para pemangku kepentingan di Desa Cibatu berkolaborasi dengan penuh semangat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Melalui forumforum partisipatif dan musyawarah desa, masyarakat berperan aktif dalam merumuskan dan mengimplementasikan program-program pemberdayaan sebagai contoh bahwa desa Cibatu saat ini memiliki usaha *home industry* Tembakau,kicimpring khas cibatu, dan sentra kulit. Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masyarakat Desa Cibatu menjadi pelaku utama. Mereka tidak hanya sebagai pengusaha lokal tetapi juga sebagai agen perubahan yang memotivasi satu sama lain. Keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, pelatihan keterampilan, dan berbagi pengetahuan menjadi langkah-langkah konkrit yang diterapkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di tingkat desa.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Desa Cibatu bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tentang membangun fondasi sosial dan budaya yang kokoh. Desa Cibatu adalah contoh nyata bagaimana peran masyarakat yang kuat dapat menjadi kunci sukses dalam menghadirkan transformasi positif di tingkat lokal, menciptakan desa yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing.

4) Tantangan yang Dihadapi

Di tengah pesatnya transformasi ekonomi global, perhatian terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat desa semakin menjadi sorotan. Salah satu contohnya adalah Desa Cibatu, sebuah fase tersembunyi yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

Meskipun potensinya besar, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM di Desa Cibatu dihadapkan pada berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti minimnya akses terhadap pembiayaan, kurangnya keterampilan manajerial, dan ketidakpastian pasar merupakan beberapa hambatan utama yang perlu diatasi untuk

mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, perlu adanya strategi pembangunan yang komprehensif untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di Desa Cibat.

4. KESIMPULAN

Perjalanan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Cibat menggiring kita pada suatu kesimpulan yang cukup untuk kita pahami. Yakni Desa ini menjadi model inspiratif bagaimana kolaborasi aktif antara masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lokal dapat menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan.

Pertama, peran pemberdayaan masyarakat tidak hanya sekadar konsep tetapi kenyataan hidup di Desa Cibat. Masyarakat, dengan semangat gotong-royong, terlibat dalam pengambilan keputusan, merancang program pemberdayaan, dan mengimplementasikannya dengan penuh dedikasi. Kedua, UMKM di Desa Cibat bukan sekadar entitas bisnis, tetapi komunitas yang saling mendukung. Keterlibatan aktif dalam pelatihan keterampilan, pertukaran pengetahuan, dan kolaborasi antar-UMKM menciptakan ekosistem yang memberdayakan pertumbuhan bersama. Ketiga, pembangunan di Desa Cibat memberikan bukti bahwa kesuksesan pemberdayaan masyarakat tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari kesejahteraan sosial dan ketahanan budaya.

Kesimpulan ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat dan UMKM di Desa Cibat bukan hanya capaian lokal akan tetapi peran pemerintah desa yang mampu memberikan bantuan yang cukup dan pembangunan desa yang sesuai di harapkan oleh masyarakatnya, tak hanya itu tetapi juga sebuah cermin bagi desa-desa lainnya untuk mengejar mimpi pemberdayaan yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Endris, E., & Kassegn, A. (2022). The role of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in sustainable development: Evidence from sub-Saharan Africa. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.1186/s13731-022-00221-8>
- Jamaludin, A. N. (2017). *Sosiologi pedesaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2021). *Perkembangan data UMKM dan usaha besar di Indonesia*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Narayan, D. (2002). *Empowerment and poverty reduction: A sourcebook*. Washington, DC: World Bank.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Raharjo, T. (2020). Pemberdayaan UMKM sebagai strategi pengembangan ekonomi lokal. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 16(3), 210–222.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Membangun perekonomian rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2022). *Pemberdayaan masyarakat: Konsep dan implementasi pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). New York, NY: Pearson.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- Wijaya, A. (2022). Peran UMKM dalam pembangunan ekonomi lokal. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(2), 85–97.
- World Bank. (2018). *Rural development strategy: Improving livelihoods and reducing poverty*. Washington, DC: World Bank.
- Yudarwati, G. A., Gregory, A., Jain, R., Joshi, B., Lane, A. B., L'Etang, J., Paquette, M., Sommerfeldt, E. J., Theunissen, P., Valentini, C., & Yang, A. (2022). Improving government communication and empowering rural communities: Combining public relations and development communication approaches. *Public Relations Review*, 48(2), 102174. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2022.102174>.